



IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PROPERTI

Naura Abelia Diva Larasati ^{a*}, Dyah Ratnawati ^b

^a Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 22013010350@student.upnjatim.ac.id,

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur

^b Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dyah.ak@upnjatim.ac.id,

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur

* Penulis Korespondensi: Naura Abelia Diva Larasati

ABSTRACT

This study evaluates the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the financial management and accountability of a property company. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, direct observation, and document review related to the recording and reporting of cash disbursements. Thematic analysis was used to identify dominant patterns in the findings. Transparency is achieved through recording cash disbursements in accordance with the budget, supported by valid transaction evidence. This allows access for authorized internal parties. Accountability is reflected in an organized recording and reporting system, including multi-level approvals and verification. Adherence to standard operating procedures, independence in financial decision-making, and equitable division of tasks reinforce orderly management. Internal controls and regular assessments ensure the accuracy and reliability of financial data. Overall, GCG implementation functions effectively and enhances the company's management standards and financial accountability..

Keywords: *Good Corporate Governance; Financial Management; Financial Accountability; Transparency; Accountability*

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di perusahaan properti. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen terkait pencatatan dan laporan pengeluaran kas. Analisis tematik digunakan untuk menemukan pola dominan dari hasil temuan. Temuan mengungkapkan bahwa transparansi diwujudkan melalui pencatatan pengeluaran kas yang sesuai dengan anggaran dan didukung oleh bukti transaksi yang sah. Kondisi tersebut memungkinkan pihak internal yang berwenang untuk mengakses informasi pengeluaran kas. Akuntabilitas tercermin dalam sistem pencatatan dan pelaporan yang terorganisir, termasuk persetujuan serta verifikasi bertingkat. Kepatuhan terhadap prosedur operasi standar (SOP), kemandirian dalam pengambilan keputusan finansial, dan pembagian tugas yang adil memperkuat manajemen yang teratur. Pengendalian internal serta penilaian rutin memastikan keakuratan dan keandalan data finansial. Secara umum, penerapan GCG berjalan efektif dan meningkatkan standar pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan perusahaan.

Kata Kunci: *Tata Kelola Perusahaan yang Baik; Pengelolaan Keuangan; Pertanggungjawaban Keuangan; Transparansi; Akuntabilitas*

1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dengan persaingan bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan properti dihadapkan pada tantangan besar untuk mempertahankan kinerja keuangan sekaligus menjaga kepercayaan stakeholders. Oleh karena itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, atau yang dikenal dengan Good Corporate Governance (GCG), menjadi kebutuhan utama. Prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi,

akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional dan efektivitas manajemen risiko, tetapi juga memperkuat akuntabilitas keuangan serta meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan serta mendukung keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang [20].

Industri properti memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia karena terkait erat dengan pembangunan infrastruktur, penyediaan perumahan, dan investasi berkelanjutan. Meski demikian, sektor ini dihadapkan pada sejumlah hambatan, termasuk perubahan siklus bisnis, kebutuhan modal yang besar, risiko penundaan proyek, dan tekanan untuk transparansi dari investor serta otoritas pengawas. Kondisi ini membuat manajemen keuangan di perusahaan properti menjadi sangat penting, sebab kesalahan dalam kontrol internal atau ketidakjelasan aliran dana dapat langsung memengaruhi kelanjutan proyek dan citra perusahaan. Di tengah tantangan tersebut, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) semakin krusial, bukan hanya sebagai pemenuhan persyaratan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol manajemen yang mendukung terciptanya keberlanjutan usaha melalui tata kelola yang efektif. yang memperkokoh keakuratan laporan keuangan, mencegah praktik tidak etis, serta memastikan setiap langkah bisnis dijalankan dengan tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua stakeholders [2].

Berbagai penelitian kuantitatif secara konsisten menunjukkan hubungan positif antara penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan peningkatan kinerja keuangan perusahaan, terutama di sektor properti dan real estate yang memiliki risiko dan kompleksitas operasional tinggi. Penelitian yang diterbitkan dalam *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 22 No. 1 (2024) dengan judul "*The Influence of Good Corporate Governance (GCG) toward Financial Performance*" menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme GCG termasuk efektivitas dewan direksi dalam pengambilan keputusan strategis, peran dewan komisaris dalam pengawasan, keberadaan komite audit sebagai pengendali internal, serta struktur kepemilikan institusional dan manajerial berdampak signifikan pada peningkatan indikator kinerja keuangan seperti ROA, ROE, dan margin laba. Temuan ini menegaskan bahwa semakin baik tata kelola perusahaan, semakin tinggi efisiensi operasional dan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga nilai perusahaan pun meningkat [3].

Penelitian lain oleh Wiranata dan Ananda (2024) juga menunjukkan hasil serupa dan menemukan bahwa penerapan GCG tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja sinergis dengan modal intelektual dan ukuran perusahaan. Modal intelektual meliputi sumber daya manusia, inovasi, dan sistem organisasi menjadi faktor penting memperkuat efektivitas GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan. Selain itu, ukuran perusahaan berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan [19]. Perusahaan yang lebih besar dengan struktur organisasi yang lebih matang cenderung mampu menerapkan mekanisme tata kelola yang lebih kuat dan terukur. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa penerapan GCG secara konsisten dan terintegrasi dengan aset intelektual perusahaan dapat mendorong pengelolaan keuangan yang lebih sehat sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan di sektor properti.

Mengacu pada penjelasan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan studi berjudul "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada Perusahaan Properti. Topik ini dipilih karena penerapan prinsip GCG penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas laporan keuangan perusahaan. Penerapan GCG bukan hanya merupakan tuntutan regulasi, melainkan juga kebutuhan strategis untuk memastikan keandalan informasi keuangan dan mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan. Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip GCG pada perusahaan properti sering menghadapi hambatan seperti lemahnya pengawasan internal, transparansi informasi keuangan yang belum optimal, serta potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Kompleksitas industri properti yang melibatkan banyak proyek, kontraktor, dan mitra bisnis juga meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan apabila tata kelola tidak dijalankan secara konsisten. Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas GCG sangat bergantung pada komitmen kuat dari seluruh unit organisasi [16].

Penelitian ini berfokus pada aspek utama berikut: penerapan prinsip transparansi dalam penyajian informasi keuangan, akuntabilitas manajemen melalui mekanisme pengawasan internal, independensi dalam pengambilan keputusan keuangan, serta penerapan prinsip kewajaran dalam kebijakan keuangansejauh mana akuntabilitas manajemen tercermin melalui mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan internal; bagaimana independensi perusahaan dijaga dalam pengambilan keputusan keuangan; serta bagaimana penerapan prinsip kewajaran memastikan bahwa seluruh kebijakan keuangan dijalankan secara

proporsional dan tidak merugikan pihak tertentu. Keempat prinsip tersebut dianalisis untuk melihat bagaimana implementasinya secara terpadu dapat memperkuat pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan perusahaan properti.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Agency Theory (Teori Keagenan)

Teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan kontrak antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen (agent). Pada perusahaan properti, pemilik mendelegasikan pengelolaan proyek, keuangan, dan aset kepada manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Namun, perbedaan kepentingan sering memicu masalah keagenan. Dalam konteks tata kelola perusahaan dan pelaporan keuangan, teori keagenan menegaskan pentingnya mekanisme pengawasan untuk meminimalkan potensi penyimpangan. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) melalui transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dapat menekan konflik keagenan dengan meningkatkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas manajemen, sehingga mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham dengan memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan prinsip GCG juga mendukung penguatan sistem pengendalian internal, pelaporan keuangan yang berkualitas, serta kepercayaan pemangku kepentingan pada perusahaan, terutama pada sektor properti yang rawan risiko penyimpangan [16].

2.2. Stakeholder Theory (Teori Stakeholder)

Teori Stakeholder menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, melainkan juga kepada semua pihak terkait seperti karyawan, kreditur, konsumen, pemerintah, dan masyarakat. Setiap stakeholder berhak atas informasi penting mengenai aktivitas perusahaan yang memengaruhi keputusan mereka. Dalam pelaporan perusahaan, teori ini memosisikan pemegang saham dan investor sebagai kelompok yang membutuhkan data finansial dan non-finansial untuk mengevaluasi performa serta kelangsungan bisnis. Investor, khususnya pemegang saham utama, bahkan meminta laporan keberlanjutan berkualitas tinggi sebagai acuan untuk menilai risiko. Selain menjadi dasar pengambilan keputusan investasi, laporan keberlanjutan juga merupakan salah satu instrumen penting dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) melalui penyediaan informasi yang transparan dan akuntabel kepada para pemangku kepentingan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. [6].

2.3. Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)

Good Corporate Governance (GCG) adalah serangkaian mekanisme, proses, dan struktur yang dirancang untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan supaya pengelolaan bisnis berjalan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Tujuan GCG adalah memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan manajemen sesuai dengan kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan, serta peraturan yang berlaku. Dengan demikian, GCG menjadi pedoman tata kelola yang mengurangi risiko penyimpangan, meningkatkan kepercayaan publik, dan menjaga kelangsungan perusahaan [20].

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menghasilkan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Sementara itu, OECD (2021) menekankan bahwa GCG bertujuan menciptakan pasar yang efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga pengelolaan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Adapun lima prinsip utama GCG yang menjadi pedoman berbagai Perusahaan dan regulator di Indonesia adalah sebagai berikut :

2.3.1. Transparansi (Keterbukaan)

Transparansi dalam Good Corporate Governance (GCG) mengharuskan perusahaan menyampaikan informasi penting secara jelas, akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan. Informasi yang harus diungkap meliputi laporan keuangan, struktur kepemilikan, susunan manajemen, kebijakan perusahaan, strategi bisnis, serta pengelolaan risiko. Transparansi tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga mencakup penyampaian informasi material lain yang membantu pemegang saham, kreditur, dan pihak terkait dalam pengambilan keputusan [12].

2.3.2. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban atas Keputusan)

Prinsip akuntabilitas mengharuskan setiap pihak di perusahaan seperti manajemen, dewan direksi, komisaris, dan auditor memiliki peran serta tanggungjawab yang tegas, sehingga semua keputusan dan tindakan bisa dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dengan akuntabilitas yang transparan dan terstruktur, perusahaan mampu menerapkan kontrol internal serta evaluasi kinerja yang efektif, yang mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip ini juga memperkuat integritas, pengambilan Keputusan yang akurat, kepatuhan terhadap hukum, serta meningkatkan performa dan kepercayaan pasar melalui pembagian tugas yang jelas [9].

2.3.3. Responsibilitas (Kepatuhan terhadap Peraturan)

Prinsip Responsibilitas menekankan bahwa perusahaan wajib menjalankan seluruh aktivitas bisnisnya dengan mematuhi hukum, peraturan, dan standar tata kelola yang berlaku. Setiap Keputusan manajemen harus dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka regulasi, mencakup kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, keselamatan kerja, perlindungan konsumen, serta pelestarian lingkungan. Prinsip ini juga menekankan komitmen perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial kepada karyawan, Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan menerapkan hal ini, Perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan operasional yang etis, berkelanjutan, dan tidak membahayakan pihak manapun [14].

2.3.4. Independensi (Profesional tanpa Konflik)

Prinsip independensi atau kemandirian menuntut seluruh unsur kepemimpinan dan pengawasan dalam perusahaan termasuk manajemen, dewan pengarah, dan komite terkait untuk bekerja secara profesional tanpa campur tangan, tekanan, ataupun pengaruh pihak mana pun. Setiap keputusan harus diambil secara objektif, bebas dari konflik kepentingan, baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Selain itu, prinsip ini memastikan bahwa setiap bagian dalam struktur perusahaan tidak saling mendominasi, sehingga proses pengelolaan dan pengambilan keputusan berjalan transparan, taat aturan, dan selaras dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) [10].

2.3.5. Fairness (Kewajaran)

Prinsip kewajaran menuntut perusahaan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara adil dan tanpa diskriminasi. Hak pemegang saham, kreditur, karyawan, konsumen, dan pihak terkait lainnya harus dipenuhi sesuai aturan dan perjanjian yang berlaku. Dalam GCG, fairness memastikan kebijakan perusahaan, distribusi keuntungan, akses informasi, serta hak suara di RUPS diberikan secara proporsional dan tidak memihak, sehingga kepentingan semua stakeholder dipertimbangkan secara seimbang [4].

2.4. Pengelolaan Keuangan Perusahaan

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan semua transaksi perusahaan. Pada Perusahaan properti, proses ini lebih kompleks karena nilai aset tinggi, kontrak panjang, dan keterlibatan banyak pihak. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) memastikan pengelolaan keuangan dilakukan dengan hati-hati, transparan, dan sesuai standar akuntansi. Pengendalian biaya, keputusan investasi yang tepat, serta perencanaan pajak yang akurat sangat penting untuk mempertahankan kinerja dan nilai perusahaan. Dengan demikian, manajemen keuangan berperan vital dalam mendukung kelangsungan dan efisiensi operasional bisnis [15].

2.5. Financial Accountability (Pertanggungjawaban Keuangan)

Pertanggungjawaban keuangan mewajibkan perusahaan menyediakan laporan keuangan yang akurat, informatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks Good Corporate Governance (GCG), ini melibatkan pelaporan yang transparansi serta pengendalian internal yang kuat. Hal ini mencakup pelaksanaan audit internal dan eksternal, kepatuhan pada Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), serta penyampaian laporan kepada pemegang saham, otoritas pengatur dan masyarakat umum. Prinsip akuntabilitas juga mengharuskan pengawasan yang ketat, pemenuhan standar akuntansi, serta penerapan sistem pelaporan yang memperbaiki transparansi dan mutu informasi keuangan [11].

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menguraikan implementasi GCG dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di perusahaan properti. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman kontekstual mengenai proses, praktik dan mekanisme tata kelola perusahaan sebagaimana terjadi di lapangan. Penelitian dilaksanakan di salah satu perusahaan properti di Surabaya dengan fokus pada evaluasi penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam aktivitas keuangan perusahaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara dengan tiga informan yang berasal dari pihak keuangan (Officer-3 S&O Support) yang dilaksanakan selama satu minggu, yaitu pada tanggal 8-12 Desember 2025, serta studi dokumentasi yang berkaitan dengan proses pengelolaan dan pelaporan keuangan. Gagasan-gagasan ini dimanfaatkan untuk memahami dampak Good Corporate Governance (GCG) pada manajemen serta tanggung jawab finansial. Hasil analisis kemudian dievaluasi dengan merujuk pada teori keagenan, teori stakeholder, serta literatur tentang GCG dan pengelolaan keuangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bagian keuangan pada salah satu perusahaan properti di Surabaya, didapatkan hasil sebagai berikut :

4.1. Transparansi Akses Informasi Pengeluaran Kas

Bagian keuangan menerapkan transparansi melalui pencatatan pengeluaran kas yang terstruktur dan sesuai anggaran. Setiap pengeluaran dicatat rinci dengan dukungan bukti transaksi sah, sehingga pihak internal berwenang dapat memantau informasi keuangan dengan mudah. Sebagaimana disampaikan oleh informan dari bagian keuangan :

“Pengeluaran kas berupa beban operasional area dilakukan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan melalui penginputan nota transaksi ke dalam aplikasi. Informasi pengeluaran tersebut dapat diketahui oleh manajer lini dan pihak terkait yang memiliki kewenangan dalam proses persetujuan.”

Bagian keuangan mengelola pengeluaran kas operasional sesuai anggaran melalui sistem pencatatan terintegrasi. Setiap transaksi dimasukkan ke dalam aplikasi dengan bukti yang valid, sehingga memungkinkan manajer lini dan pihak yang berwenang untuk mengawasi informasi secara efisien. Transparansi ini didasarkan pada prosedur pencatatan, persetujuan, dan pengawasan yang sistematis.

4.2. Akuntabilitas dalam Proses Pencatatan dan Pelaporan Keuangan

Penerapan akuntabilitas dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan serta adanya pembagian peran yang jelas dalam setiap tahapan pengelolaan pengeluaran kas. Proses pencatatan yang didukung dengan bukti transaksi dan mekanisme verifikasi berjenjang memungkinkan setiap pengeluaran kas dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara administratif. Sebagaimana disampaikan oleh informan dari bagian keuangan :

“Bagian keuangan memastikan kepatuhan prosedur dengan mewajibkan setiap pengeluaran kas operasional area diinput ke aplikasi disertai nota transaksi yang sah, direkap, serta diketahui dan ditandatangani oleh manajer lini dan pihak terkait sebelum diajukan ke tingkat regional.”

Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan tidak hanya bergantung pada pencatatan transaksi, tetapi juga pada kejelasan tanggung jawab dan efektivitas mekanisme pengawasan yang diterapkan dalam proses pelaporan keuangan.

4.3. Kepatuhan terhadap Standar dan SOP

Penerapan kepatuhan terhadap standar dan SOP pengeluaran kas tercermin dari proses pencatatan dan pelaporan yang dilakukan secara sistematis serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap pengeluaran kas dilaksanakan berdasarkan anggaran, didukung bukti transaksi, dan dilengkapi dokumen administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sebagaimana disampaikan oleh informan dari bagian keuangan :

“Ya, proses pencatatan dan pelaporan pengeluaran kas telah mengikuti standar dan SOP. Penerapannya

dilakukan melalui pencatatan beban operasional area sesuai budget, penginputan bukti transaksi ke aplikasi, pembuatan rekap pengeluaran, serta pengajuan Surat Perintah Pembayaran yang ditandatangani EVP sebagai lampiran pertanggungjawaban.”

Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap SOP menjadi dasar penting dalam memastikan pengeluaran kas dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan terstruktur.

4.4. Independensi dalam Pengelolaan dan Persetujuan Pengeluaran Kas

Independensi dalam pengelolaan dan persetujuan pengeluaran kas dipertahankan melalui mekanisme persetujuan bertahap serta kepatuhan terhadap anggaran yang telah disetujui. Keputusan pengeluaran tidak bergantung pada satu pihak saja, melainkan melibatkan berbagai tingkat otorisasi untuk menjamin objektivitas. Sebagaimana disampaikan oleh informan dari bagian keuangan :

“Objektivitas dijaga dengan memastikan bahwa setiap pengeluaran kas harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan serta melalui persetujuan berjenjang. Mulai dari manajer lini, pihak terkait, hingga regional melalui Surat Perintah Bayar yang ditandatangani EVP.”

Temuan ini mengindikasikan bahwa independensi pengelolaan keuangan didukung oleh sistem pengendalian internal yang membatasi potensi pengaruh kepentingan pribadi dalam proses pengeluaran kas.

4.5. Kewajaran dan Kesetaraan dalam Pembagian Tugas dan Akses Informasi

Prinsip kewajaran dan kesetaraan diwujudkan melalui pembagian tugas yang seimbang serta akses informasi berdasarkan kewenangan pegawai keuangan. Tidak ada bentuk diskriminasi dan perbedaan dalam menjalankan tugas atau mengakses data pengeluaran kas. Sebagaimana disampaikan oleh informan dari bagian keuangan :

“Seluruh pegawai keuangan mendapatkan perlakuan yang adil dalam pembagian tugas dan akses informasi. Setiap pegawai menjalankan fungsi sesuai tanggungjawabnya, sementara akses informasi pengeluaran kas diberikan berdasarkan kewenangan dalam proses pencatatan dan pertanggungjawaban.”

Temuan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam pembagian peran dan akses informasi mendukung terciptanya sistem pengelolaan keuangan yang tertib dan profesional.

4.6. Upaya Pencegahan Kesalahan dan Menjaga Objektivitas Pengeluaran Kas

Kesalahan dalam pengeluaran kas dicegah melalui pencocokan nota transaksi dengan anggaran serta verifikasi sebelum pengajuan pembayaran. Prosedur ini mengurangi risiko kesalahan pencatatan atau ketidaksesuaian anggaran sejak tahap awal. Sebagaimana disampaikan oleh informan dari bagian keuangan :

“Bagian keuangan melakukan perekapan nota-nota transaksi yang dikumpulkan dari rekan lapangan untuk kemudian disesuaikan dengan budget yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengeluaran tersebut diinput ke dalam aplikasi, diverifikasi, dan direkap untuk diketahui serta ditandatangani oleh manajer lini dan pihak terkait. Setelah itu, rekap diajukan ke tingkat regional untuk penerbitan Surat Perintah Pembayaran yang ditandatangani oleh EVP sebagai bentuk validasi tingkat regional.”

Temuan ini menyoroti bahwa pengendalian internal berperan penting dalam menjaga objektivitas dan keakuratan pengelolaan pengeluaran kas.

4.7. Evaluasi Berkala terhadap Sistem Pencatatan Pengeluaran Kas

Sistem pencatatan pengeluaran kas dievaluasi dengan memverifikasi dan meninjau dokumen secara bertahap. Mulai dari manajer area hingga ke regional atau pusat. Seluruh dokumen pertanggungjawaban diperiksa kembali sebelum diinput ke dalam sistem. Sebagaimana disampaikan oleh informan bagian keuangan :

“Bagian keuangan melakukan evaluasi melalui peninjauan rekap pengeluaran kas yang telah diinput dalam aplikasi, diverifikasi dan disetujui oleh manajer lini serta pihak terkait, kemudian diajukan ke tingkat regional. Selanjutnya, seluruh dokumen pertanggungjawaban diverifikasi kembali ke pusat sebagai verifikasi tambahan sebelum dilakukan input ke dalam sistem SAP. Proses ini menjadi bentuk pengendalian berlapis untuk memastikan transparansi dan keakuratan pencatatan pengeluaran kas.”

Temuan ini menegaskan bahwa evaluasi berkelanjutan menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan akurasi data pengeluaran kas. Sekaligus mendukung penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

4.8 Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran kas untuk operasional di perusahaan properti dikelola mengikuti anggaran yang telah disahkan, dengan dokumentasi rinci yang dibuktikan oleh transaksi yang sah. Ini memungkinkan pihak internal yang relevan untuk mengawasi data keuangan secara efisien, yang menggambarkan penerapan transparansi dalam Good Corporate Governance (GCG). Penelitian sebelumnya juga menegaskan pentingnya transparansi dalam menyampaikan informasi keuangan yang jelas kepada para pemangku kepentingan, sehingga memperkuat kepercayaan dan tanggung jawab organisasi [9]. [18] juga menemukan bahwa penerapan prinsip GCG secara signifikan meningkatkan transparansi keuangan dan akuntabilitas, yang menghasilkan praktik manajemen keuangan yang lebih etis dan bertanggungjawab.

Di luar transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan properti dapat dilihat dari sistem pencatatan dan pelaporan yang sistematis, serta prosedur persetujuan yang bertingkat. Setiap pengeluaran kas dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara administrasi, yang mencerminkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas dalam pelaporan keuangan. Pendekatan ini sesuai dengan teori agensi, yang menekankan pentingnya mekanisme kontrol untuk meminimalkan konflik kepentingan antar manajer sehingga menghindari penyimpangan.

Studi oleh [17] membuktikan bahwa praktik GCG seperti transparansi dan akuntabilitas meningkatkan mutu laporan keuangan, yang menggambarkan keterkaitan antara tata kelola yang baik dan pengelolaan keuangan yang bertanggungjawab. Penerapan prosedur operasi standar (SOP) dalam pengeluaran kas membantu menjaga ketertiban pengelolaan keuangan, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan administrasi. Kepatuhan pada SOP serta penerapan tata kelola internal yang efektif merupakan komponen utama dalam GCG untuk meningkatkan efisiensi sistem pelaporan keuangan [4] menekankan bahwa implementasi GCG yang konsisten dapat memperkuat performa keuangan.

Independensi, sebagai komponen GCG, menjamin bahwa Keputusan keuangan dibuat secara objektif, yang terlihat dari sistem persetujuan bertahap pada pengeluaran kas. Hasil penelitian [17] menguatkan bahwa prinsip GCG seperti independensi dapat meningkatkan kredibilitas manajemen, integritas, serta kepercayaan dari investor dan stakeholder. Pembagian tanggung jawab dan akses data yang seimbang serta adil menunjukkan implementasi prinsip keadilan (fairness) dalam tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip tersebut membangun suasana kerja yang profesional dan meningkatkan kekuatan sistem kontrol internal. [4] menyatakan bahwa prinsip tata kelola perusahaan seperti keadilan secara nyata memperbaiki mutu laporan keuangan, dengan cara mempertahankan keseimbangan kewajiban di antara pemegang saham dan para pihak terkait lainnya.

Pengendalian internal, yang merupakan komponen utama dalam tata kelola perusahaan yang baik, berperan penting dalam menghindari kekeliruan atau pelanggaran pada proses pencatatan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan bertingkat berhasil menjaga ketepatan dan kebenaran pengelolaan dana dengan efisien. Penerapan tata kelola yang melibatkan pengendalian internal, dapat meningkatkan pandangan tentang mutu keuangan serta membantu tercapainya sasaran pengelolaan yang maksimal [4]. Evaluasi bertahap memastikan bahwa catatan keuangan yang valid dan mengikuti prosedur yang ditetapkan menunjukkan dedikasi perusahaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas melebihi standar dasar. [7] mengungkapkan bahwa pengawasan terus-menerus terhadap tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kualitas tata kelola secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif tapi juga berkontribusi terhadap kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Untuk memperkuat pemahaman atas hasil temuan penelitian, berikut ini disajikan tabel ringkasan yang memuat tema-tema utama hasil wawancara, kutipan empiris dari informan, serta interpretasi teoritis berdasarkan landasan pustaka.

Tabel 1. Tabel Interpretasi Penelitian Berdasarkan Literatur Relevan

Tema yang Muncul	Kutipan Empiris dari Informan	Interpretasi Teoritis
<i>Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pada Perusahaan Properti (Naura Abelia Diva Larasati)</i>		

Transparansi Pengeluaran Kas	<i>“Pengeluaran kas operasional dicatat sesuai anggaran dan diinput ke aplikasi disertai nota transaksi sehingga dapat diketahui pihak berwenang”.</i>	Transparansi dalam GCG menekankan keterbukaan dan kemudahan akses informasi keuangan untuk mendukung pengawasan internal. [18]
Akuntabilitas Pencatatan Keuangan	<i>“Setiap pengeluaran kas diinput, direkap, dan disetujui berjenjang sebelum diajukan ke regional.”</i>	Akuntabilitas mencerminkan pertanggungjawaban atas aktivitas keuangan melalui pencatatan dan pelaporan yang jelas. [2]
Kepatuhan terhadap SOP	<i>“Pencatatan dan pelaporan pengeluaran kas dilakukan sesuai standar dan SOP yang berlaku.”</i>	Kepatuhan SOP merupakan bagian dari prinsip tanggungjawab dalam GCG untuk menjaga tertib administrasi. [13]
Independensi	<i>“Pengeluaran kas tidak diputuskan sepihak, tetapi melalui persetujuan berjenjang.”</i>	Independensi menjaga objektivitas pengambilan keputusan dan mencegah konflik kepentingan. [17]
Kewajaran	<i>“Pembagian tugas dan akses informasi disesuaikan dengan kewenangan masing-masing.”</i>	Prinsip kewajaran menjamin perlakuan adil dan proporsional dalam pengelolaan keuangan. . [4]
Pengendalian Internal	<i>“Nota transaksi diverifikasi dan disesuaikan dengan anggaran sebelum pembayaran.”</i>	Pengendalian internal berfungsi mencegah kesalahan dan meningkatkan keandalan laporan keuangan. [4]
Evaluasi Berkala	<i>“Dokumen pengeluaran diverifikasi hingga pusat sebelum diinput ke sistem.”</i>	Evaluasi berkelanjutan mendukung akurasi dan integritas informasi keuangan. [7]

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada perusahaan properti berjalan dengan baik. Transparansi terlihat dari pencatatan pengeluaran yang sesuai anggaran, didukung bukti transaksi yang sah, sehingga memungkinkan akses dan pengawasan informasi keuangan oleh pihak internal yang berwenang. Akuntabilitas diwujudkan lewat sistem pencatatan dan pelaporan yang sistematis, dengan mekanisme persetujuan serta verifikasi bertingkat. Kepatuhan pada prosedur operasi standar (SOP) menjadi dasar utama untuk memastikan setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Independensi dan kewajaran tercermin dari pembagian tugas yang jelas serta proses pengambilan keputusan keuangan yang melibatkan otorisasi multi-tingkat, bukan keputusan sepihak.

Pengendalian internal yang disertai evaluasi terus-menerus memastikan akurasi, validitas, dan keandalan data keuangan. Secara keseluruhan, prinsip GCG tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga secara nyata meningkatkan mutu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan perusahaan.

Berdasarkan temuan penelitian, penulis menyarankan perusahaan untuk tetap mempertahankan serta mengoptimalkan implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Perusahaan dianjurkan untuk memperkuat penerapan sistem informasi keuangan terintegrasi demi meningkatkan efisiensi proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Disamping itu, evaluasi rutin terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pengendalian internal harus dilakukan secara berkelanjutan guna mengurangi risiko kesalahan serta memperkuat akuntabilitas. Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program pelatihan mengenai Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen keuangan direkomendasikan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. R. I. M. Setiadi, S. Rustad, P. N. Andono, and G. F. Shidik, "Digital image steganography survey and investigation (goal, Amari, A. (2013). Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas perangkat lunak. *International Journal of Business and Management Invention*. Vol. 2, No. 4, [10.1016/j.sigpro.2022.108908](https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2022.108908)
- [2] Aziza, I., Inggit, k., & Selika, R. R. (2024). pengaruh mekanisme corporate governance terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. *moneter: jurnal ekonomi dan keuangan : Asosiasi Riset Ilmu Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 3(1), 324–328. <https://doi.org/10.61132/moneter.v3i1.1230>
- [3] Cahyani, A. D., Putri, S. M., Naka, O. A., & Lestari, T. N. (2024). Literature Review: Implementasi Etika Bisnis Dengan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 76–88 <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.316>
- [4] Desviani, D. P., Sinatra, Z. A. R., Sianipar, C. M. M., Kusumaningtias, R., & Kusumaningsih, A. (2025). Good Corporate Governance Dan Informasi Akuntansi: Keseimbangan Antara Tanggung Jawab Kepada Pemegang <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11961>
- [5] Restyasih, R. R., Anugrahenny, D., Putri, S., & Wildan, M. I. (2025). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap pengungkapan esg pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bei 1, 2, 3, 3. *11(2)*, 211–222 DOI:[10.61994/equivalent.v3i1.649](https://doi.org/10.61994/equivalent.v3i1.649)
- [6] Fajarini, I., & Wahyuningrum, S. (2022). Pengaruh Comprehensive Stakeholder Pressure dan Good Corporate Governance terhadap Kualitas Sustainability Report. *6*, 813–827 <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.680> Febriansyah, S., & Darni, S. (2025). Mewujudkan Transparansi Keuangan: Kolaborasi GCG dan Manajemen Risiko dalam Mengurangi Fraud. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 3(1), 1–8. *Vol. 3 No. 1 (2025): Journal of Economics, Management, and Accounting*
- [7] Fizi, A., Rahardian, M., & Helmina, A. (2023). Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan. *1*, 379–387 <https://doi.org/10.71456/sur.v1i2.603>
- [8] Hasanudin, H. (2023). Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Rumpun Ilmu Ekonomi (MAR – Ekonomi) Applying the Principles of Good Corporate Governance in Corporate Financial Management *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Rumpun Ilmu Ekonomi (MAR – Ekonomi)*. 1(02), 49–55. <https://doi.org/10.58471/mar-ekonomi.v1i02.115>
- [9] Iqbal, M., Bastian, A., Ainul, I., Sabran, H., & Harahap, S. (2024). Analisis Penerapan dan Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Syariah Di Perbankan Syariah. *2(1)*, 330–339. DOI:[10.61132/santri.v2i1.275](https://doi.org/10.61132/santri.v2i1.275)
- [10] Iqom, M., & Khaq, D. (2022). Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Rangka Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *7(2)*, 384–401. DOI:[10.20885/JLR.vol7.iss2.art12](https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art12)
- [11] Kelvianto, I. (2018). Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance untuk keberlanjutan usaha pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur pengolahan kayu. *6(2)*, 1–7. DOI: <https://doi.org/10.56895/plr.v13i1.2210>
- [12] Maharani, E. N., Akbar, A. M., Maheswari, J. L., & Suwarsit, S. (2024). Penerapan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(4), 384–393. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i4.2647>

- [13] Nabila, T., Sihombing, D. O., Luthfi, M. K., & Maisyarah, R. (2025). Literature Review : Implementation of Good Corporate Governance Principles in Improving Company Performance. 2(3), 1–9 <https://doi.org/10.47134/jampk.v2i3.659>
- [14] Ompusunggu, D. P., Irenetia, N., Pembangunan, E., & Palangkaraya, U. (2023). Pentingnya Manajemen Keuangan Bagi Perusahaan. 3(2).<https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i2.1129>
- [15] Rusydi, A. R., Palutturi, S., Noor, N. B., & Pasinringi, S. A. (2020). The implementation of good corporate governance (GCG) at public hospital in Indonesia: A literature review. *Enfermeria Clinica*, 30, 145–148. [10.1016/j.enfcli.2019.10.057](https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.10.057)
- [17] Safitri, T. N., Athaya, N. S., Miranda, A., & Maisyarah, R. (2025). Analysis of Good Corporate Governance in Increasing Investor Trust. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan*, 2(4), 10. DOI: [10.47134/jampk.v2i4.669](https://doi.org/10.47134/jampk.v2i4.669)
- [18] Shabrina, H. N., Putri, R. A., Fitriyani, S., Ananda, R. A., & Dewi, A. P. (2024). Pentingnya Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan PT. KAI. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 8(1), 101–115 <https://doi.org/10.31002/jpalg.v8i1.8625>
- [19] Sianturi, T. G., Ujung, S., Pasaribu, N., Kemala, P., & Lubis, D. (2025). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 5, 2347–2361. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18599>
- [20] Syofyan, E. (2021). *Good corporate governance (GCG)*. Unisma Press. DOI: [10.24036/jea.v7i4.3436](https://doi.org/10.24036/jea.v7i4.3436)